

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021

Rencana Startegis disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan Stake Holder dengan mengacu pada Rancangan awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi penyusunan RENSTRA ini, sehingga segala usul dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sangat diperlukan. Karena RENSTRA merupakan dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang akan dijadikan sebagai pedoman Pelaksanaan Pembangunan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perumusan dan penyusunan RENSTRA ini.

Praya, November 2018

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI,SH

NIP. 19640804 198609 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2. Sumber Daya perangkat Daerah	12
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	12
2.2.2. Saran dan Prasarana (Aset/modal)	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31

	3.5. Penentuan Isu – isu strategis	33
Bab IV	TUJUAN, SASARAN	38
	4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
	1. Tujuan	38
	2. Sasaran	39
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	1. Strategi	41
	2. Arah Kebijakan	46
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	57
Bab VIII	PENUTUP	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan disektor sosial dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efektif dan efisien.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, yang mempunyai tugas dibidang Sosial, terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Disamping itu hal yang harus dilaksanakan adalah yang menyangkut keterpaduan, kecermatan program, hal yang harus dilaksanakan adalah menyangkut keterpaduan, kecermatan program dan kegiatan karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya khususnya arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terus menerus dan berkelanjutan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Agar pembangunan terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang urusan pemerintahan daerah tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Strategis Dinas Sosial adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran

pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2016-2021 (Permnedagri No 54 Tahun 2010).

1.2 Ladasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
 25. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 ;
 26. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6),
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).
32. Perda No 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 2),
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6),
34. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 68),

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dimaksudkan untuk :

- 1.3.1 Dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun.

- 1.3.2 Dijadikan acuan dalam penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan DPA_SKPD sebagai dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah
- 1.3.3 Dijadikan payung hukum penetapan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini adalah agar pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial berjalan efektif dan efisien, terarah, terkendali, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan, sasaran

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam kedudukannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib yang memiliki fungsi dan tugas menangani permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang tercakup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada pasal 6 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

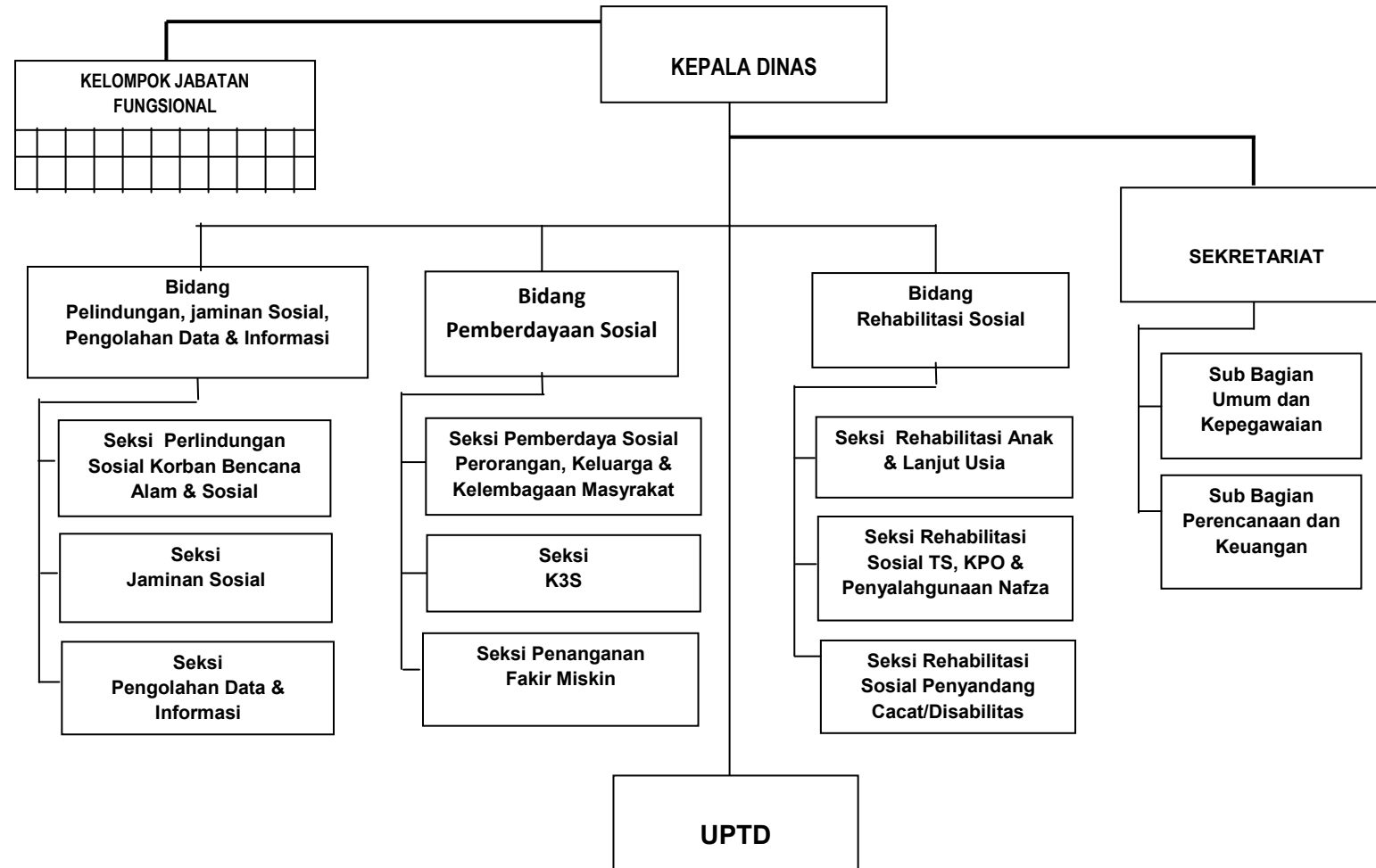
Susunan Organisasi Dinas sosial , terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - 1) Bidang Pelindungan, Jaminan Sosial, Pengelolaan Data Dan Informasi
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi
 - 2) Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dan (K3S)
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - 3) Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang Dan Penyalahgunaan Nafza
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat/Disabilitas

Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Daerah

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Dinas Sosial didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDM) yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 38 orang. Jumlah dan komposisi pegawai dimaksud sebagai berikut :

1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1 Data Status Kepegawaian Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

NO	UNIT KERJA	JUMLAH			PERSENTASE			KET
		PNS	CPNS	PTT	PNS	CPNS	PTT	
					(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	DINAS SOSIAL	34	-	4	89,47	-	10,53	
JUMLAH		34	-	4	89,47	-	10,53	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel. 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	MENURUT GOLONGAN				PERSENTASE			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
						(%)	(%)	(%)	%

Renstra 2016-2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	DINAS SOSIAL	-	7	21	6	-	20	62	18
JUMLAH			7	21	6		20	62	18

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

3. Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Sosial Kab. Loteng

Tabel. 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DINAS SOSIAL			10			1	1	19	3
2										
JUMLAH				10			1	1	19	3

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

4. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Dinas Sosial Kab. Loteng

Tabel. 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN					KET
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	FUNGSIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DINAS SOSIAL	-	1	4	8	-	
JUMLAH		-	1	4	8		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset/modal)

Renstra 2016-2021

Aset/modal yang dimiliki oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi adalah seperti yang digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel 2.5 Daftar Aset /Modal Dinas Sosial Kab. Loteng

No Reg	Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Vulume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4		5	6
1. Tanah						
0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah					
0002	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 2000	10.000	M2	10.000 m2	TMP
0003	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 1974	700	M2	700 m2	LBK
0004	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 1974	2.000	M2	2.000 m2	Perumsos Jln lalas Seruni
0006	Tanah Kantor Pemerintah	Tahun 1994	11.836	M2	11.836 m2	Eks. Kantor Satpol PP
Jumlah (Tanah)						
2. Peralatan dan Mesin						
	Alat Angkutan (Kendaraan Roda 2,4 dan 6		22	Unit	22 unit	
	Almari Arsip Kayu		12	Bh	12 bh	
	White Boar		1	BH	1 bh	
	Kursi Rapat Biru (Uciwa)		5	BH	5 bh	
	Meja Bundar		1	unit	1 unit	

Renstra 2016-2021

	Kursi tamu		4	unit	4 unit	
	Kursi Plastik		30	BH	30 bh	
	Kursi Lipat		17	BH	17 bh	
	Meja dan Kursi kerja Pejabat dan stap		47	Bh	47 bh	Meja 29, Kursi 28
	Komputer/PC		4	Unit	4 unit	
	Laptop		11	unit	11 unit	
	Note Book		2	unit	2 unit	
	Printer		11	unit	11 unit	
	UPS		2	buah	2 bh	
	Hardisd		3	buah	3 bh	
	Alat-alat studio dan komunikasi		2	Set	2 set	
	Mega Phone		1	buah	1 bh	
	Camera Digital		4	buah	4 bh	
	Mesin Potong Rumput		2	BH	2 bh	
	LCD		2	Unit	2 unit	
	AC		2	Unit	2 unit	
	Kipas Angin		6	BH	6 bh	
	Televisi		1	BH	1 bh	
	Wireles		2	Unit	2 unit	
	Microphon		2	BH	2 bh	
	Tiang Mic Berdiri		2	BH	2 bh	
Jumlah (Peralatan dan Mesin)						
3. Gedung dan Bangunan						
0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
0001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2017	24	M2	24 m2	
0001	Bangunan Gedung Tempat	2017	35	M2	35 m2	

Renstra 2016-2021

	Pertemuan Permanen					
0001	Asrama Permanen					
0001	Rumah Negara Golongan II Type E Semi Permanen	1974	128	m2	128 m2	
0001	Bangunan Gudang Lain-lain					
0001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen					
0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
0001	Asrama Semi Permanen					
0001	Bangunan Pagar Makam	2014	1000	M	100 m	TMP
0001	Tugu Kemerdekaan					
0001	Asrama Permanen					
0001	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen					
0001	Rumah Negara Golongan II Type E Permanen					
0001	Gedung Pos Jaga Permanen	2017	6	M2	6 m2	
0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen, Tiori					
0001	Konstruksi Pagar	2016	70	M	7 M	PKH
0002	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen					
0001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					
0001	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen					
0002	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					

Renstra 2016-2021

0003	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					
0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
0003	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen					
0001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen					
0001	Rehab Ruang Sekretariat					
0001	Pemasangan Rabat	2016	21	M2	25m2	PKH/LBK
0001	Rehab Ruang Laboratorium					
0001	Rehab Ruang Instruktur					
0001	Rehab Gedung Pralatan					
0001	Pemagaran Halaman Kantor	2017	100	m	100 m	Eks Pol PP
0001	Rehab Ruang PB					
0001	Pemasangan Keramik Gedung Kantor Sekretariat					
0001	Pemasangan Paving Block TMP	2016	50	M	49,674,000	Dinsos
Jumlah (Peralatan dan Mesin)						

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Capain Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan target/sasaran Rencana Strategis (Renstra) Periode 2011-2015, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kenerja Pelayanan SKPD ,seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Loteng

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Sosial																		
1	Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	80%			10	10	10	20	30	1,85	7,89	0,54	25,66	42,20	18	78,9	5,4	128	140

Renstra 2016-2021

2	Persentase PMKS Skala Kabupaten yg menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE	60%			5	10	10	15	20	0,88	1,90	1,37	0,64	38,98					
3	Prosentase Panti Sosial skala Kabupaten yg menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social	80%			10	10	10	20	30	-	33,6 8	24,6 5	25	30					

Renstra 2016-2021

4	Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yg menyediakan sarana prasarana pelayanan	80%			5	10	10	15	20	5	10	10	15	20					
5	Prosentase Korban Bencana skala kabupaten yg menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

Renstra 2016-2021

6	Prosentase Korban Bencana skala kabupaten yg di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%								-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tdk potensial yg telah menerima jaminan social	40%			10	5	5	10	10	2,51	2,51	2,30	1,6	5,05				

Renstra 2016-2021

8	Tersedia data PMKS dan PSKS yang telah diolah sebagai data base			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9	Penyandang cacat dan eks trauma yang potensial untuk dilatih				43 orang	47 orang	53 orang	67 orang	77 orang	-	-	12 orang	20 orang	45 orang					
10	Penyandang penyakit sosial yang potensial untuk yang dilatih				81 orang	87 orang	89 orang	93 orang	155 orang	-	-	-	-	30 orang					

Renstra 2016-2021

11	Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				102 klpk	22 klpk	40 klpk	45 klpk	50 klpk	51 klpk	22 klpk	49 klpk	42 klpk	539 klpk	50	100	122	93,3	1078
12	Jumlah Penyandang cacat yang dilatih				18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang			12 orang	20 orang	25 orang					
13	Jumlah RTSM peserta Program PKH				1731 9 RTS M	1645 3 RTS M	1563 0 RTS M	1484 9 RTS M	1410 7 RTS M	1699 4 RTS M	1796 3 RTS M	1754 7 RTS M	24042 RTSM	27371 RTSM					

Renstra 2016-2021

14	Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan			100	20	20	20	20	20	16	16	16	40	45					
----	---	--	--	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib pemerintah yang memiliki cakupan pelayanan yang cukup luas. Berikut cakupan jenis pelayanan SKPD dan kelompok sasaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial :

Tabel 2.7 Jenis Pelayanan Dinas Sosial dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)
Urusan Sosial		
1	Pemberdayaan Sosial	PMKS yang terdiri dari 26 jenis PMKS
2	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, PSM dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah 2018

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi Isu SKPD yang bersifat Strategis terlebih dahulu dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan SKPD. Dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya Dinas Sosial mengidentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang di gunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Ekternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Organisasi	Dinas Sosial,	Perda dan Perbup ttg SOTK	-	Restrukturisasi Organisasi	Beban Pelayanan SKPD yang tidak diimbangi dengan Sumber Daya yang memadai
2. Sumber Daya Manusia	38 (PNS dan PTT)	Reg. Pegawai 2018	Mengoptimalkan Peran SDM yg Tersedia	Penempatan pegawai	Pelayanan SKPD belum optimal
3. Pemberdayaan PMKS dan PSKS	Belum Optimalnya Pemberdayaan Terhadap PMKS	Data PMKS dan PSKS th 2017	Pemberdayaan terhadap PMKS dan PSKS	Kecendrungan PMKS yang semakin bertambah	Masih Rendahnya cakupan Pelayanan terhadap PMKS dan pembinaan

	dan PSKS				terhadap PSKS
--	----------	--	--	--	---------------

umber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

Dari identifikasi permasalahan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, berikutnya yaitu, pengidentifikasian isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Adapun pengidentifikasian isu strategis disajikan ada table berikut :

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-isu Strategis (lingkungan Eksternal) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Globalisasi	Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021

Visi Yaitu menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**.

Pernyataan yang tertuang dalam dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu disegala

aspek kehidupan dan disertai pengamalan nilai-nilai agama. Visi **BERSATU** tersebut mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu :

- Kata '**Beriman**' berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- Kata '**Sejahtera**' berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;
- Kata '**Bermutu**' berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu :

- 1) Meningkatkan kerukunan, Kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- 3) Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas;
- 4) Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai;

- 5) Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, maka termuat dalam misi Kepala Daerah yang ke-2 (dua) yaitu :

- **MISI KEDUA : *“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender”***

Misi Kedua ini menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) , terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga, terwujudnya sistem pendidikan Nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 3.3. Permasalahan pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Sosial				
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan PMKS Belum Optimal	Tingginya PMKS, Data PMKS belum akurat, Metode pembinaan yang belum tepat	Tersedianya PSKS sebagai pilar kesejahteraan social
2	Meningkatnya kualitas dan intensitas Pembinaan Lembaga Sosial	Intensitas Pembinaan Terhadap PSKS masih rendah	Keterbatasan Sumberdaya	Kebijakan Daerah

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 201

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang social secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) sesuai pelayanan Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

Tabel 3.4. Hasil Kajian Dokumen KHLs Kabupaten Lombok Tengah

No	Aspek Kajian	Ringkasan KHLs	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Potensi Terjadinya Bencana yg tdk bias di prediksi	Meningkatnya Intensitas Pelayan sosial tanggap darurat terhadap korban bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.	Kinerja layanan/ jasa ekosistem			
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat ketentraman dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pada musim kemarau terdapat beberapa wilayah selatan yang berdampak pada kekeringan dan kekurangan air bersih	Tingginya permohonan warga terhadap bantuan penyauran air bersih	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			
----	---	--	--	--

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi Dinas Sosial pada tahun 2016-2021 perlu mengidentifikasi permasalahan yang berdampak pada pelayanan SKPD seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Berikut identifikasi permasalahan pelayanan SKPD terhadap berbagai aspek kajian pada bab-bab sebelumnya:

Tabel 3.5. Tabel Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD dari berbagai Aspek Kajian

NO	Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD dari berbagai aspek					
	Gambaran Pelayanan SKPD	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi NTB	Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kab. Loteng	Implikasi RT/RW	Implikasi KHL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas pelayanan publik terkait TUPOKSI belum memadai , Beban Pelayanan SKPD yang tidak diimbangi dengan Sumber Daya yang memadai	Terwujudnya Pemberdayaan PMKS yang berkualitas	Pemberdayaan PMKS Belum Optimal	Masih Rendahnya Cakupan Layanan Dasar bagi PMKS		
2	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbinanya Lembaga Sosial yang aktif dan	Intensitas Pembinaan Terhadap PSKS dan Lembaga	Belum Optimalnya Pemberdayaan terhadap PSKS dan Lembaga-lembaga		

		berkelanjutan	Sosial masih rendah	Sosial		
--	--	---------------	---------------------	--------	--	--

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

Dari berbagai permasalahan diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menentukan Isu Strategis akan menggunakan metode Pembobotan. Adapun Langkah pembobotan dimaksud melalui tahapan :

1. Menentukan Skor Terhadap Masing-masing Kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 3.6. Skor Penentuan Isu strategis

No	Kreteria	Bobot
(1)	(2)	(3)
1.	Memiliki pengaruh yang besar yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau renstra Provinsi/kabupaten/kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

2. Melakukan Penilaian Isu Strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 3.7. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingginya Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak diimbangi dengan Pemberdayaan PMKS secara Optimal	20	10	20	10	15	25	100
2.	Belum optimalnya peran PSKS dan Lembaga-lembaga Sosial dalam menangani pembangunan kesejahteraan sosial	20	10		10	15	-	55

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

3. Menghitung rata-rata bobot skor dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu
Penghitungan rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, seperti pada table berikut :

Tabel 3.8. Skor Penentuan Isu strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingginya Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak diimbangi dengan Pemberdayaan PMKS secara Optimal	100	5,8
2	Belum optimalnya peran PSKS dan Lembaga-lembaga Sosial dalam menangani pembangunan kesejahteraan sosial.	55	3,2

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

Dari metode diatas maka Isu Strategis yang menjadi tantangan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Renstra tahun 2016-2021 yaitu :

1. Tingginya Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak diimbangi dengan Pemberdayaan PMKS secara Optimal;
2. Belum optimalnya peran PSKS dan Lembaga-lembaga Sosial dalam menangani pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial;
4. Tingginya angka keterlantaran anak dan lanjut usia;
5. Masih rendahnya kualitas pelayanan dalam Panti Sosial;
6. Banyaknya Korban tindak kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja migran;

7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya;
8. Tingginya frekwensi kejadian bencana alam dan social;
9. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada lima tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, tujuan merupakan tahapan perumusan strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi misi Kepala Daerah tahun 2016-2021.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian diatas maka Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya kualitas dan Intensitas Pembinaan Lembaga Sosial;

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi tentang sesuatu yang akan dicapai, berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah merumuskan dan menetapkan pernyataan sasaran berdasarkan masalah, Isu Strategis dan tujuan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Yang terbagi menurut urusan wajib dan pilihan sesuai tupoksi OPD. Adapun Sasaran dimaksud, seperti pada table berikut ini :

Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Sosial							
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan PMKS	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial PMKS	Cakupan Layanan PMKS	24%	24,5%	25%	26 %	26,5 %
2	Meningkatnya kualitas dan intensitas Pembinaan Lembaga Social	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial	Lembaga sosial yang aktif	34,86%	39,45%	44,04%	48,62%	50,20%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Startegi

Strategi Merupakan Rumusan Perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Permendagri No.24 th 2010).

Startegi yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan metode SWOT yang merupakan teknik analisis lingkungan strategis dengan peneropongan lingkungan (Environmental Scanning) sesuai kondisi Lingkungan baik Lingkungan Internal (Kekuatan, Kelemahan) maupun Eksternal (Peluang, Ancaman). Berikut analisis Lingkungan strategis Dinas Sosial berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya :

a. Lingkungan Internal

- Kekuatan (S)
 - ✓ Adanya Tekad yang Kuat dari semua komponen
 - ✓ Adanya berbagai regulasi tentang penyelenggaraan urusan Sosial
 - ✓ Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - ✓ Tersedianya Anggaran
 - ✓ Tersedianya SOP
- Kelemahan (W)
 - ✓ Terbatasnya SDM yang Profesional
 - ✓ Sarana dan prasarana yang belum memadai
 - ✓ Terbatasnya Anggaran
 - ✓ Belum optimalnya peran PSKS, Lembaga Sosial dan pendamping lainnya
 - ✓ SOP masih yang dijalankan belum optimal

b. Lingkungan Eksternal

- Peluang (O)
 - ✓ Adanya berbagai PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Daerah
 - ✓ Tersedianya SDM Kesejahteraan Sosial
 - ✓ Tersedianya Dunia Usaha
 - ✓ Terbentuknya Forum CSR
 - ✓ Tingginya Animo Masyarakat dalam penanganan PMKS

- Ancaman (T)
 - ✓ Tingginya angka PMKS
 - ✓ Masih Tingginya angka Kemiskinan
 - ✓ Data PMKS dan PSKS masih kurang Valid
 - ✓ Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Migran masih rendah.
 - ✓ Kualitas Lembaga Sosial masih rendah

Dari kajian lingkungan stregis diatas berikut alternative strategi yang akan digunakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok tengah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan :

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya Kewenangan Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam menagani urusan Sosial ✓ Adanya berbagai regulasi tentang penyelenggaraan urusan Sosial ✓ Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ✓ Tersedianya Anggaran ✓ Tersedianya SOP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbatasnya SDM yang Profesional ✓ Sarana dan prasarana yang belum memadai ✓ Terbatasnya Anggaran ✓ Belum optimalnya peran PSKS,Lembaga Sosial dan pendamping lainnya ✓ SOP masih yang dijalankan belum optimal
EKSTERNAL		
PELUANG (O)	ALTERNATIF STRATEGI	ALTERNATIF STRATEGI

	(SO)	(WO)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya berbagai PSKS di Daerah ✓ Tersedianya SDM Kesejahteraan Sosial ✓ Tersedianya Peluang Dunia Usaha dalam penanganan PMKS ✓ Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ✓ Tingginya Animo Masyarakat untuk turut serta dalam penanganan PMKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan pembinaan kepada PSKS dan Lembaga-lembaga Sosial yang ada di Daerah 2. Otimalisasi Sumber daya dan anggaran dalam melakukan pembinaan terhadap pmks,psks 3. Regulasi Peraturan Daerah/Bupati tentang CSR di daerah 4. Meningkatkan kualitas sdm tenaga kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS 5. Koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah lain dalam pembinaan PSKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan kewenangan SKPD dalam mengoptimalkan fungsi PSKS dan lembaga-lembaga sosial 2. Mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan PMKS dan PSKS 3. Pembentukan dan Pembinaan Forum CSR dalam penanganan PMKS 4. Tingkatkan Kualitas Tenaga kesejahteraan sosial dalam menangani PMKS 5. Koordinasi, konsultasi dan kerjasam dengan pemerintah pusat Provinsi dan daerah lainnya guna memaksimalkan PSKS
ANCAMAN (T)	ALTERNATIF STRATEGI (ST)	ALTERNATIF STRATEGI (WT)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingginya angka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan regulasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi organisasi

<p>PMKS</p> <p>✓ Masih Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS</p> <p>✓ Perlindungan Sosial Pekerja Migran masih rendah.</p> <p>✓ Kualitas dan kuantitas Tenaga kesejahteraan sosial masih rendah</p> <p>✓ Pelaksanaan program dan kegiatan belum mengacu SOP</p>	<p>kewenanga dalam manangani PMKS secara tepat</p> <p>2. Sosialisasi tentang berbagai regulasi tentang kesejahteraan sosial</p> <p>3. Pelatihan keterampilan berusaha bagi pekerja migram bermasalah</p> <p>4. Intensifikasi peran lembaga2 sosial</p> <p>5. Penyusunan SOP pelayanan sosial</p>	<p>untuk mengoptilkan pelayanan social tenaga kesejahteraan sosial.</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga sosial</p> <p>3. Pemberian bantuan modal usaha bagi eks pekerja migrant bermasalah</p> <p>4. Intensifikasi, PSKS ,Lembaga pelatihan dan lembaga lainnya dalam membantu pemerintah menangani PMKS dan ketenaga kerjaan</p> <p>5. Penerapan SOP sebagai pijakan dalam melaksanakan pelayanan sosial</p>
--	--	---

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

2. Arah Kebijakan

Ketetapan atau ketentuan yang bersifat sebagai acuan, pedoman yang di terbitkan oleh yang berwenang tentang suatu bidang, substansi (obyek) tertentu demi tercapainya tujuan serta terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran yang dilayani.

Tabel berikut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi misi Bupati/Wakil Bupati dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Sosial

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU				
MISI Kedua: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Urusan Sosial				
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan PMKS	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial PMKS	koordinasi dan fasilitasi penanganan PMKS	Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS
2	Meningkatnya kualitas dan intensitas pembinaan lembaga social	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial	fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan Daerah tahun 2016-2021 maka perlu ditetapkan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Renstra 2016-2021

Tabel 6..1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah
TAHUN 2016 - 2021

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	
						TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat			Angka Kemiskinan	%	15,80	15,31		14,89		14,51		14,17		13,86		13,86	
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Perlindungan sosial dan Kesempatan Kerja			Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang	9.319	7.083		4.847		3.112		1.901		1.092		1.092	
Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemberdayaan PMKS			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani														
	Sasaran Renstra : Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial PMKS		Menurunnya angka PMKS														
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS		Penanganan PMKS	%	13,1	23,99	3,883,189.200	31,57	3,516,408.950	35,80	4,658,597.000	39,91	4,705,183.000	42,56	4,752,235.000	42,56	21,515,613.150

1	Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang	Kasus	0	0.000	20	51,800.000	35	65,332.000	50	70,577.000	64	74,599.000	169	262,308.000
2	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Anak terlantar yang dilatih	orang	30	100,000.000	35	113,925.000	0	0.000	35	113,925.000	35	113,955.000	135	441,805.000
3	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dokumen PMKS dan PSKS yang tersusun dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	dokumen	22	225,000.000	2	205,760.000	1	25,520.000	0	0.000	0	0.000	25	456,280.000
4	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Laporan hasil penanganan masalah-masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dokumen	2	270,000.000	2	441,230.000	2	275,000.000	2	375,000.000	2	400,000.000	10	1,761,230.000

5	Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya	pendamping program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berkelanjutan	orang		100	63,000.000	80	59,835.000	0	0,000	100	63,000.000	100	63,000.000	380	248,835.000
6	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi masyarakat miskin	Keluarga Miskin yang terlatih dan mendapatkan bantuan modal usaha melalui (Kube)	KK		380	1,713,705.000	70	200,214.000	700	1,136,552.250	500	925,000.000	500	925,000.000	2,150	4,900,471.250
7	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan aks trauma	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	orang		20	100,000.000	30	127,910.000	15	63,780.000	30	127,910.000	30	127,910.000	125	547,510.000
8	Pengembangan Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM yang menerima bantuan	KPM		23734	151,484.200	39724	382,003.000	58294	275,791.750	58294	376,000.000	58294	394,000.000	238340	1,579,278.950
9	Pelestarian Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K4S) dikalangan pelajar dan remaja	Jumlah Remaja yang mengikuti Penanaman Nilai K3S	orang		60	70,000.000	150	94,984.950	100	70,000.000	100	150,000.000	100	150,000.000	510	534,984.950

Renstra 2016-2021

	10	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang Penyakit sosial	Eks penyandang penyakit sosial yang dilatih (orang)	orang		75	200,000.000	120	371,312.500	400	529,597.500	400	529,597.500	400	529,597.500	1,395	2,160,105.000
	11	Biaya Operasional Penyaluran Rastra	Jumlah Keluarga Miskin yang menerima Rastra	kg				115650	614,736.000	115650	668,276.000	115650	668,276.000	115650	668,276.000	462600	2,619,564.000
	12	Pengembangan Program SLRT	Basis Data Terpadu yang divalidasi	KK		0	0.000	163388	601,445.000	163388	592,212.500	163388	592,212.500	163388	592,212.500	163388	2,378,082.500
	13	Sosialisasi tentang keperluan terhadap Penyandang Disabilitas	Even Pameran Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan	kali		1	65,000.000	1	21,792.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	86,792.500
	14	Pemberian bantuan assistensi sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas	Jumlah Lanjut usia dan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan assistensi	orang		0	0.000	100	229,461.000	500	813,685.000	400	713,685.000	400	713,685.000	1,400	2,470,516.000
	15	Pemutahiran Data PMKS dan PSKS	Data PMKS dan PSKS yang di Update	dukumen		0	0.000	0	0.000	2	142,850.000	0	0.000	0	0.000	2	142,850.000
Meningkatnya kualitas dan intensitas Pembinaan Lembaga Sosial			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSM, KT, LKS) yang aktif dalam														

Renstra 2016-2021

		Penanganan PMKS secara berkelanjutan															
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial	Meningkatnya LKS yang aktif dalam penanganan PMKS															
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial yang aktif	%	30,96	34,86	299,068.550	39,45	278,350.850	44,04	191,620.000	48,62	193,537.000	50,20	195,473.000	50,20	1,158,049.400	
	1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Dunia Usaha yang terlibat dalam penanganan PMKS melalui dana CSR	dokumen		0	0.000	1	18,800.000	1	32,780.000	1	33,537.000	1	35,473.000	4	120,590.000	
	2 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan PSKS	Jumlah orsos,KT dan PSM yang dibina melalui lomba	PSKS		72	288,000.000	80	259,550.850	0	0.000	0	0.000	0	0.000	152	547,550.850	
	3 Verifikasi, Validasi data dan Pembinaan Lembaga LKS dan PSKS	Jumlah LKS dan PSKS yang dibina	LKS		0	40,000.000	0	0.000	80	158,840.000	90	160,000.000	90	160,000.000	260	518,840.000	

PROGRAM RUTIN RENSTRA SKPD

Renstra 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan	Satuan	Indikator	Kondisi Awal (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)		
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah			Nilai	Nilai Sakip Pemda		CC		CC		B		A		A		A		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan			Nilai	Nilai LKJIP SKPD		CC		CC		B		A		A		A		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			380,936,975		546,355,200		699,932,750		706,933,000		714,003,000		3,048,160,925	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	M3	Jasa Air			119,936,975		84,000,000		83,400,000		81,700,000		81,000,000		450,036,975	
			KWH	Jasa Listrik														
			MB	Jasa Internet														
		2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	STNK Roda empat				6	148,000,000		7	170,500,000	7	170,500,000	7	172,100,000		661,100,000
			Unit	STNK Roda Dua														
		3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Bulan	Laporan Keuangan Bulanan SKPD		12	125,000,000	12	58,485,000	12	104,820,000	12	104,800,000	12	106,800,000		499,905,000	

Renstra 2016-2021

		Bulan	Laporan Keuangan Tahunan SKPD		1		1		1		1		1				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Jasa Kebersihan							2	12,000,000	2	12,000,000	2	24,000,000		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	Alat Tulis Kantor		12	10,000,000	12	87,195,200	12	106,995,000	12	97,933,000	12	98,103,000	12	400,226,200	
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	Meubelair			6,000,000		66,675,000			110,857,750		100,000,000		102,000,000		385,532,750
		Unit	Komputer/Laptop/Selver dan perlengkapannya														
		Unit	Alat-alat Rumah Tangga														
		Unit	Alat-alat elektronik lainnya														
7	Penyediaan perbaikan peralatan kerja		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki							8,400,000		10,000,000		12,000,000		30,400,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minum	kali	Jumlah Rapat		12	30,000,000	12	27,000,000	12	39,960,000	12	40,000,000	12	40,000,000		176,960,000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		12	90,000,000	7	75,000,000	7	75,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000		420,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	Prosentase sarana prasarana kondisi baik	30.96	34.86	583,812,400		291,625,000		87,151,000		88,023,000		88,904,000		1,139,515,400	
1	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Unit	Gedung Kantor terpelihara					25,600,000		7,485,000		11,000,000		11,000,000		55,085,000	

Renstra 2016-2021

	2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	Kendaraan dinas kondisi baik			130,812,400								130,812,400
	3	Pengadaan Kendaraan dinas oprasional	Unit	Kendaraan dinas			0	266,025,000		0		0		0	266,025,000
	4	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Unit	Gedung Kantor layak pakai											
	5	Pembangunan Gedung Kantor	Unit	Gedung kantor			453,000,000	0		79,666,000		77,023,000		77,904,000	687,593,000
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
			%	Prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu			119,485,750	45,935,000		57,786,250		58,365,000		58,949,000	340,521,000
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen Perencanaan :		4	119,485,750	5	45,935,000	5	57,786,250	4	58,365,000	4	58,949,000
				RENSTRA				1		1					
				RENJA		2		2		2		2		2	
				RKA		2		2		2		2		2	
			Dokumen	Laporan Capaian kinerja :											

Renstra 2016-2021

			Laporan kinerja bulanan		12		12		12		12			
			LKJIP		1		1		1		1			
			LKPJ		1		1		1		1			
			LPPD		1		1		1		1			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah tahun 2016-2021 maka perlu menetapkan capaian kinerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyelenggara bidang urusan sosial untuk mencapai tujuan sasaran RPJMD berikut :

Tabel 7.1 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang Mengacu pada pencapaian Tujuan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN SOSIAL								
1	Penanganan PMKS (%) / tahun	13,1	23,99	31,57	35,80	38,91	42,56	42,56
2	Lembaga berbadan Sosial yang aktif (%) / tahun	30,96 %	34,86 %	39,45 %	44,04 %	48,62 %	50,20 %	50,20 %

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah 2018

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang menuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dengan memperhatikan segala potensi dan kebutuhan.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 dan akan menjadi dokumen dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.

**Praya, November 2018
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,**



**BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 003**